



Regional Financial Management Policies and Their Implications for Regional Governance

Muhammad Afdhal Arrazak¹, Aldri Frinaldi², Asnil³, Nora Eka Putri⁴

Email : muhammadafdhalarrazak@gmail.com

^{1,2,3,4} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

ABSTRACT

This study aims to understand the role of regional financial management policies and their implications for regional governance. This study uses a literature review method by examining various scientific articles discussing regional financial policies, budget management, and governance practices. The results of the discussion indicate that regional financial management policies not only function as technical guidelines for budget management but also as an important instrument in building orderly and directed governance. The quality of budget planning, flexible yet controlled implementation, and effective oversight are key factors influencing the accountability and efficiency of regional financial management. Furthermore, consistent policy implementation encourages transparency and strengthens the institutional capacity of regional governments, despite the challenges of differences in resource capabilities and regional fiscal conditions. Overall, regional financial management policies play a strategic role in strengthening regional governance and supporting public interest-oriented governance.

Keywords : Regional Financial Policy; Regional Financial Management; Governance

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat menjalankan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Faisol & Yandri Radhi Anadi, 2022; Manopo et al., 2019; Rahman & Saputra, 2022).

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan menjadi semakin luas. Daerah diberikan ruang untuk menyusun anggaran, mengalokasikan belanja, serta mengelola pendapatan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan pengelolaan keuangan yang jelas dan terarah agar kewenangan yang dimiliki dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan selaras dengan tujuan pemerintahan daerah (Faisol & Yandri Radhi Anadi, 2022; Manopo et al., 2019; Rahman & Saputra, 2022; Sugianto et al., 2020).

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah menetapkan prinsip, mekanisme, dan arah pengelolaan keuangan yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Ketepatan kebijakan ini berpengaruh pada bagaimana anggaran direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah (Agres et al., 2025; Fitria et al., 2025; Witono et al., 2021).

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang baik menuntut adanya kejelasan peran, keteraturan prosedur, serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih tertib dan terarah (Rahman & Saputra, 2022; Septariani, 2018).

Selain itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah turut memengaruhi hubungan antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Kejelasan kebijakan membantu menciptakan keselarasan antara perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih sistematis dan mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan (Nurhayati, 2017; Rahman & Saputra, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah menjadi penting untuk memahami implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Pemahaman ini diperlukan agar pengelolaan keuangan tidak hanya dilihat dari sisi administratif, tetapi juga dari perannya dalam membentuk praktik pemerintahan yang tertata, konsisten, dan berorientasi pada pencapaian tujuan daerah. Dengan latar belakang tersebut, kajian ini diarahkan untuk menelaah hubungan antara kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan daerah secara lebih menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan memanfaatkan artikel-artikel ilmiah yang membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan daerah. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan topik, baik yang membahas aspek kebijakan, manajemen keuangan daerah, maupun implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Artikel-artikel tersebut dijadikan rujukan untuk memahami berbagai pandangan, konsep, serta perkembangan pemikiran mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka kebijakan publik. Informasi yang terkandung dalam artikel-artikel tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun pembahasan secara sistematis mengenai keterkaitan antara kebijakan keuangan daerah dan praktik tata kelola pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang dimiliki. Melalui kebijakan tersebut, arah pengelolaan keuangan diharapkan selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan kebutuhan Masyarakat (Manopo et al., 2019; Rahman & Saputra, 2022; Safriani, 2017).

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini mengatur bagaimana anggaran disusun, bagaimana prioritas ditetapkan, serta bagaimana pengawasan dilakukan. Dengan kerangka kebijakan yang jelas, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan sekaligus menghindari penyimpangan dalam pelaksanaannya (Lestari & Hutagaol, 2023; Norhadijah et al., 2023; Zaenudin & Hamdani, 2023).

Hasil telaah terhadap berbagai artikel ilmiah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran. Perencanaan yang baik memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara lebih terarah sesuai kebutuhan daerah. Sebaliknya, perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan penggunaan anggaran tidak optimal dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah (Ahmad Nurrafi' Arfitsani & Ananta Prathama, 2025; Maulida & Zulkarnain, 2025; Wijayanti et al., 2025; Yuliana Heydemans et al., 2025).

Selain perencanaan, pelaksanaan anggaran menjadi tahap yang menentukan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan kondisi yang berkembang. Fleksibilitas ini penting agar daerah dapat merespons kebutuhan yang muncul tanpa harus keluar dari kerangka aturan yang berlaku. Namun demikian, fleksibilitas tersebut tetap memerlukan pengendalian yang memadai agar tidak menimbulkan ketidakteraturan dalam pengelolaan keuangan (Mariana Natalia Tri De Wieke Jiman et al., 2025; Ngw & Rozikin, 2024; Pappa et al., 2023; Rahman & Saputra, 2022; Sitanggang, 2025).

Aspek pengawasan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari berbagai literatur yang dikaji, pengawasan yang efektif membantu memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Alessandro Orno et al., 2025; Batubara & Risna, 2020; Kurniawan Sarototonafo Zai & Cardinal Pranatal Mendrofa, 2023; Muhtar et al., 2021; Safriani, 2017; Tasik et al., 2024).

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga berimplikasi langsung terhadap transparansi pemerintahan. Ketika kebijakan diterapkan secara konsisten, informasi mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran dapat disampaikan secara lebih terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik karena memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana sumber daya publik dikelola (Lestari Sitorus et al., 2025; M. Rizki Maulidi et al., 2025; Suryana & Akla, 2020).

Implikasi lain dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah terlihat pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Untuk menjalankan kebijakan keuangan dengan baik, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem administrasi, meningkatkan kompetensi aparatur, serta menata prosedur kerja yang jelas. Penguatan kapasitas ini berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih tertib dan terstruktur (Amaruddin et al., 2025; Budiharjo et al., 2025; Canales et al., 2025; Herman Lawealai et al., 2021; Priono et al., 2019; Sabnur et al., 2025).

Di sisi lain, kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Perbedaan kemampuan sumber daya manusia, kondisi fiskal daerah, serta kompleksitas regulasi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memerlukan penyesuaian yang berkelanjutan agar tetap relevan dengan kondisi daerah (Azlina et al., 2020; Farida et al., 2023; Karina et al., 2023).

Hubungan antara kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan terlihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong akuntabilitas dan efisiensi. Ketika kebijakan dijalankan dengan baik, proses pemerintahan menjadi lebih tertata dan penggunaan anggaran dapat diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki kualitas pemerintahan (Asep Hikmat & Ismanudin, 2024; Karina et al., 2023; Priono et al., 2019).

Jadi, hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam membentuk tata kelola pemerintahan daerah. Kebijakan yang jelas, didukung oleh perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik, dapat memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang tertib, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mencapai tujuan pembangunan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah berperan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran, sekaligus sebagai instrumen tata kelola pemerintahan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan yang terarah, pengawasan yang efektif, serta penerapan transparansi menjadi faktor utama dalam mendukung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kebijakan tersebut mendorong penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam membentuk tata kelola pemerintahan daerah yang tertib, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agres, O., Sodoma, R., Ilchyshyn, I., Kovalchuk, O., & Shmatkovska, T. (2025). Regional development project management: Financial aspect. *Technology Audit and Production Reserves*, 3(4(83)), 87–92. <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2025.330027>
- Ahmad Nurrafi' Arfitsani & Ananta Prathama. (2025). Inovasi Perencanaan Anggaran Belanja Kegiatan Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. *Public Service and Governance Journal*, 6(1), 46–57. <https://doi.org/10.56444/psgj.v6i1.2385>
- Alessandro Orno, B., Salle, A., & Wonar, K. (2025). The Effect of Supervision and Transparency Management of Village Funds on Community Trust in Kampung Yahim Jayapura District. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 4(12), 2428–2437. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i12.946>
- Amaruddin, A. A., Rasmuin, & Rahmawati. (2025). Implementing of the Local Government Information System Policy in Financial Report Preparation For Local Government Units: A Case Study in Baubau City: IMPLEMENTATION. *Ilomata International Journal of Social Science*, 6(1), 297–309. <https://doi.org/10.61194/ijss.v6i1.1482>
- Asep Hikmat & Ismanudin. (2024). Accountability for the Performance of Government Apparatus in Regional Financial Management. *Public Service: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(1), 30–47. <https://doi.org/10.61166/service.v1i1.2>

- Azlina, N., Naza, A., & Julita, J. (2020). Factors influencing readiness of local governments in implementing government regulation in government of Riau province. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(1), 13–23. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss1.art2>
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 95–109. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221>
- Budiharjo, R., Pratomo, D., & Hapsari, D. W. (2025). Local Government Financial Performance: Good Governance, the Effectiveness Internal Control and Competence. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 10(1), 125–138. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v10i1.16916>
- Canales, H. B. G., Siguayro, R. A., Cruz, G. S., & Durand, J. B. B. (2025). Labor Competencies in the Strengthening of Local Government Public Management in Peru: Towards Achieving SDG 16. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e04065. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04065>
- Faisol, F. & Yandri Radhi Anadi. (2022). FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(4). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i4.19254>
- Farida, U., Kholidinna Qasabandiyah, M., & Ansar, A. (2023). Understanding Public Policy in Regional Financial Management: A Narrative Approach to Analyzing Policy Implementation and Its Impact on Local Development. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 197–216. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i1.647>
- Fitria, F., Nuriyatman, E., Amir, L., & Sitta Saraya. (2025). Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 147–161. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>
- Herman Lawealai, Nastia, & Hastuti. (2021). Analysis of Local Government Strategies in Capacity Building for Regional Financial, Asset, and Revenue Management Bodies in Baubau City, Indonesia. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(1), 161–173. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i1.137>
- Karina, A., Nur, M., Molina, M., Digidowiseiso, K., & Ali, A. (2023). A Review of Internal Control and Accountability of Regional Financial Management Literature. *Global Journal of Business, Economics & Social Development*, 1(2), 101–107. <https://doi.org/10.56225/gjbesd.v1i2.13>
- Kurniawan Sarototonafo Zai, & Cardinal Pranatal Mendrofa, C. P. M. (2023). PERANAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PADA DINAS PPKAD KOTA GUNUNGSITOLI. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 1252–1259. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.50259>
- Lestari, S. T., & Hutagaol, H. D. (2023). Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 755–772. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2699>
- Lestari Sitorus, Nurullaeli Uswatun H, Suci Ananda Sitompul, & Nazwa Feryal Kamila. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>
- M. Rizki Maulidi, Zia Safira, Jihaan Nabila, & Mariana Mariana. (2025). Digital Transformation in Local Government: Enhancing Financial Transparency through the Regional Financial Information System (SIKD). *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum*,

- Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 54–66. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.266>
- Manopo, N., Rotinsulu, D. C., & Murni, S. (2019). ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 17(2). <https://doi.org/10.35794/jpek.10249.17.2.2015>
- Mariana Natalia Tri De Wieke Jiman, Anthon Simon Y. Kerihi, & Minarni A. Dethan. (2025). Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja, SPIP, dan Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur: Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 223–235. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.2017>
- Maulida, R., & Zulkarnain, T. (2025). Analisis perencanaan keuangan daerah terhadap efektivitas anggaran daerah di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 8(1), 697–702. <https://doi.org/10.31004/jutin.v8i1.40215>
- Muhtar, Taufiq Arifin, & Sutaryo. (2021). Performance Accountability in Indonesian Local Governments: Does Monitoring Really Work? *International Journal of Business and Society*, 22(3), 1673–1692. <https://doi.org/10.33736/ijbs.4329.2021>
- Ngw, B., & Rozikin, Z. (2024). Financial Management of the Regional Public Service Agency at Puskesmas in Sumbawa District. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i27.17087>
- Norhadijah, N., Yuni, S., & Christian, F. (2023). PENGARUH IMPLEMENTASI TRANAKSI NON TUNAI, AKUNTABILITAS, DAN KEBIJAKAN LEGAL SISTEM INFORMASI TERHADAP PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan). *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 22–34. <https://doi.org/10.52300/blnc.v14i1.8554>
- Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 1(2). <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1062>
- Pappa, L., Menne, F., & Suriani, S. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR. *Indonesian Journal of Business and Management*, 6(1), 01–16. <https://doi.org/10.35965/jbm.v6i1.3870>
- Priono, H., Yuhertiana, I., Sundari, S., & Puspitasari, D. S. (2019). ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE IMPROVEMENT OF LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(1), 77–86. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7110>
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Sabnur, A. I., Usman, H., & Dasila, R. A. (2025). The Effect of The Implementation of Good Governance and Internal Control on The Performance of Local Government Financial Management in Palopo City. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 4(4), 664–677. <https://doi.org/10.54408/jabter.v4i4.415>
- Safriani, A. (2017). TELAAH TERHADAP ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3660>
- Septariani, J. (2018). PENERAPAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD

- GOVERNMENT GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) PADA KABUPATEN MUSI BANYUASIN. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 158. <https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1169>
- Sitanggang, A. (2025). Implementation of Balance of Control and Flexibility of Government Budget using Management Control System. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(3). <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i03.p09>
- Sugianto, B., Kurniawati, D., & Abbas, Z. (2020). OTONOMI DAERAH DAN PELUANG INVESTASI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 66. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.286>
- Suryana, E. P., & Akla, M. (2020). Regional Financial Transparency Towards Independence of Development and Good Governance. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(1), 75–94. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.34132>
- Tasik, P., Remmang, H., & Faridah, F. (2024). Peranan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah Kota Makassar. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(3), 163–171. <https://doi.org/10.56326/access.v2i3.2788>
- Wijayanti, A. T., Mamonto, F., & Bulu, L. (2025). Conformity of Planning and Budgeting Documents for Regional Government Budgets (APBD) at the Regional Research and Development Planning Agency of Kotamobagu City. *Technium Social Sciences Journal*, 67, 25–37. <https://doi.org/10.47577/tssj.v67i1.12103>
- Witono, B., * N., & * R. (2021). REGULATION HEGEMONY AND ACCOUNTABILITY OF THE LOCAL GOVERNMENT: A STUDY ON REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN INDONESIA. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 29(1), 57–94. <https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2021.29.1.4>
- Yuliana Heydemans, Agnes L.Ch.P. Lagian, & Een.N.Walewangko. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Serta Dampaknya Pada Keterlambatan Penyerapan Anggaran Di Kabupaten Minahasa Selatan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(3). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i3.6844>
- Zaenudin, Z., & Hamdani, H. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(3), 1306–1320. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.897>